SKRIPSI

EFEKTIVITAS DINAS PUPR TERKAIT PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN PINRANG DI KECAMATAN MATTIRO BULU

OLEH :

ARDHITA UGHIATMI
NIM : 2220203874235046

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

EFEKTIVITAS DINAS PUPR TERKAIT PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN PINRANG DI KECAMATAN MATTIRO BULU

OLEH :

ARDHITA UGHIATMI
NIM : 2220203874235046

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi	:	Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrakstruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu
Nama Mahasiswa	:	Ardhita Ughiatmi
NIM	:	2220203874235046
Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Fakultas	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2840 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing : Indah Fitriani Sukri, M.H (.....)
NIDN : 2001029701

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman. MHi
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrakstruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu
Nama Mahasiswa	:	Ardhita Ughiatmi
NIM	:	2220203874235046
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2840 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	30 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Indah Fitriani Sukri, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Muh. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah swt. Berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya lah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan do'a demi keberhasilan dan kebahagiaan peneliti.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih tekhusus kepada Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku Pembimbing saya yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Ibu Indah Fitriani Sukri M.H, selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak heti- hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Kepala Bidang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dan Masyarakat Lingkungan Pao, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada cinta pertama saya, Ayahnda H. Najemuddin dan Ibunda tercinta saya Hj. Yanna. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tanpa syarat, serta dukungan moral dan materi yang tiada henti selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah selama masa kuliah hingga ke titik penyusunan skripsi ini. Dukungan dan doa kalian adalah kekuatan terbesar penulis. Semoga pencapaian ini bisa menjadi awal untuk membuat bapak dan mama bangga. Terima kasih untuk semuanya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

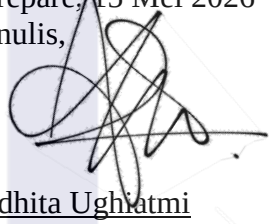
10. Kepada saudara penulis Muhammad Arnas dan Muhammad Sabir. Terima kasih membantu penulis menajaga dan merawat Ibu kami yang sakit sehingga penulis bisa melukan penelitian dan mengerjakan tugas akhir tanpa mengkhawatirkan ibu kami. Tak lupa keponakan saya Alfarendra Dhanfa yang telah menghibur penulis saat merasa bosan dalam menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.
11. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
12. Kepada teman teman saya Nabila Aprilia, A. Dewi, Riska Amelia, Jesicha Ismail, Nurfajriah Malik dan lainnya dalam segala hal selalu menemani dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih telah menemani penulis dan telah berkontribusi banyak dalam penelitian skripsi, baik tenaga, waktu, maupun materil. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan semoga hal-hal baik akan terus menghampiri dalam hal yang dilalui kedepannya.
13. Kepada sahabat saya, Putri Salsabilla. Terima kasih telah memberi penulis semangat saat penulis merasa lelah akan tugas akhir ini dan terima kasih sudah menjadi tempat curhat bagi penulis dan menjadi bagian dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada lelaki yang bernama Jeon Jungkook, Penulis ucapkan terima kasih karena sudah menjadi idola serta pemberi senyum bagi penulis jika penulis merasa terpuruk, Penulis berharap suatu hari nanti penulis bisa bertermu secara langsung dengan dirimu.
15. Terakhir kepada diri sendiri, Ardhita Ughiatmi. si anak bungsu dan harapan orang tuanya. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Mei 2026
Penulis,



Ardhita Ughiatmi
NIM.2220203874235046

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

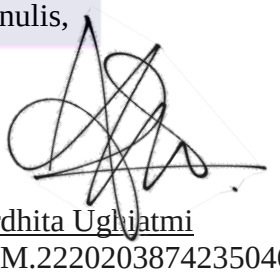
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Ardhita Ughiatmi
NIM	:	2220203874235046
Tempat/Tgl. Lahir	:	28 november 2003
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrakstruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2026
Penulis,



Ardhita Ughiatmi
NIM.2220203874235046

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ardhita Ughiatmi, *Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrakstruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu* (dibimbing oleh : Ibu Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini membahasa tentang Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Dinas PUPR Dalam program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu (2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Mattiro Bulu (3) Bagaimana Peran Dinas PUPR Terhadap Efektivitas Perbaikan Jalan Di Kecamatan Mattiro Bulu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian adalah empiris dengan data kualitatif deskriptif dengan teksnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro Bulu telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi kelembagaannya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 2) Efektivitas Pelaksanaan program perbaikan jalan oleh Dinas Bina Marga di Kecamatan Mattiro Bulu sudah berjalan sesuai prosedur, akan tetapi efektivitasnya belun sepenuhnya optimal. 3) Peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang terhadap efektivitas perbaikan jalan di Kecamatan Mattiro Bulu dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah telah berjalan dengan cukup baik karena telah melaksanakan fungsi eksekutif dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Infrastruktur Jalan, Dinas PUPR, Efektivitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjaun Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 13
C. Kerangka Konseptual 21
D. Kerangka Pikir 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
C. Fokus Penelitian 45
D. Jenis dan Sumber Data 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Uji Keabsahan Data 49
G. Teknik Analisis Data 50

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Proses Perencanaan Program Perbaikan Infrastruktur Jalan Yang Akan Dilakukan Oleh Dinas PUPR Kabupaen Pinrang 52
B. Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Dinas PUPR Di Kecamatan Mattiro Bulu 57
C. Efektivitas Hasil Perbaikan Infrastruktur Jalan Yang Dilakukan Oleh Dinas PUPR Efektif Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu 63
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
LAMPIRAN
BIODATA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Absen Pelatihan Kerja	Terlampir
8.	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. **Transiliterasi**

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

a. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيْلَ :qīla

يَمُوْتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ :*al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

d. Syaddah (Tasydid)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

اَلْحَقُّ :*al-haqq*

اَلْحَجُّ :*al-hajj*

نُعِّمَ :*nu‘‘ima*

عَدُوٌّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

اَلشَمْسُ :*al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

البِلاَدُ :*al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ :*ta’murūna*

النَّوْءُ :*al-nau’*

شَيْءٌ :*syai’un*

أُمِرْتُ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

h. Lafz al-Jalalah (الله)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللّٰهِ *Dīnullah* باللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى‌الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون‌ناشر
الخ	=	إلى‌آخرها/إلى‌آخره

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keberadaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat adalah jalan. Jalan merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga keberadaannya sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.[1]

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.[2] Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu,

[1] Rion Rion, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019," *Pamarenda Public Administration and Government Journal* 2, no. 3 (2023): 241,.

[2] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jalan kabupaten.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah juga mengatur tata kelola konstruksi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Pengelolaan pembangunan infrastruktur juga harus didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Selain itu di tingkat pemerintah daerah juga menetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya dan Tata Ruang, yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah. Peraturan bupati tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam melaksanakan program pembangunan dan perbaikan jalan. [4]Regulasi ini juga mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengawasan, serta koordinasi

[3] Wiwi Soliha, "Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 13, no. 3 (2022): 141–45.

[4] Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya dan Tata Ruang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antarinstansi terkait agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadikan infrastruktur jalan sebagai sarana penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama dalam distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat pemerintahan.

Salah satu wilayah yang sangat bergantung pada infrastruktur jalan adalah Kelurahan Padaidi yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan, sehingga kondisi jalan memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan mempermudah akses masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian menuju pasar maupun pusat distribusi lainnya.

Namun demikian, kondisi infrastruktur jalan di Kelurahan Padaidi masih menghadapi berbagai permasalahan. Kerusakan jalan sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan berat yang mengangkut hasil pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa ruas jalan mengalami kerusakan sedang hingga berat sehingga menghambat mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, keterbatasan anggaran serta kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbaikan jalan juga menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya penanganan kerusakan jalan di wilayah tersebut.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan infrastruktur yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam penyusunan prioritas pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga beberapa program perbaikan jalan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh proses perencanaan yang tepat serta pelaksanaan program yang efektif.

Permasalahan infrastruktur jalan sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan pola umum permasalahan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah lain di Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kerusakan jalan di wilayah perdesaan umumnya dipicu oleh kombinasi antara faktor alam, seperti curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil, dengan faktor non-alam seperti beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan serta kualitas konstruksi yang kurang sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang terjadi di Kelurahan Padaidi, di mana aktivitas pengangkutan hasil pertanian dengan kendaraan bermuatan berat turut mempercepat tingkat kerusakan jalan, sehingga memperkuat urgensi penelitian terhadap efektivitas penanganan infrastruktur di wilayah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di sisi lain, persoalan keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan infrastruktur jalan juga merupakan tantangan klasik yang banyak ditemukan pada pemerintah kabupatena dan kota di Indonesia, khususnya daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif terbatas. Keterbatasan fiskal ini sering kali memaksa pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas pembangunan, sehingga tidak semua ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat ditangani secara bersamaan dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang berbasis data serta penetapan prioritas yang tepat agar program perbaikan jalan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses perencanaan program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan, serta sejauh mana hasil perbaikan infrastruktur jalan mampu meningkatkan kelancaran mobilitas dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis proses perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang, serta menilai efektivitas hasil perbaikan infrastruktur jalan terhadap kelancaran mobilitas dan kepuasan masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu, khususnya di Kelurahan Padaidi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana Peran Dinas PUPR Dalam program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Mattiro Bulu?
3. Bagaimana Peran Dinas PUPR Terhadap Efektivitas Perbaikan Jalan Di Kecamatan Mattiro Bulu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui proses perencanaan program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrangdi Kecamatan Mattiro Bulu
2. Untuk Mengetahui efektifitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan oleh oleh Dinas PUPR du Kecamatan Mattiro Bulu
3. Untuk Mengetahui Peran Dinas PUPR Terhadap Efektivitas Perbaikan Jalan Di Kecamatan Mattiro Bulu ditinjau dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada hukum tata negara. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan efektivitas perbaikan infrastruktur jalan oleh pemerintah aerah terkhusus kabupaten pinrang.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan serta program peraikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro bulu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai peran Dinas PUPR terhadap efektivitas perbaikan jalan, selain itu penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau bahan rujukan bagi mahasiswa, maupun peneliti dalam memahami hubungan antara pelaksanaan tugas pemerintah daerah, efektivitas pembangunan infrastruktu dan prinsi-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjaun hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan. Melalui telaah literatur mengenai "Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecematan Mattiro Bulu" ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa pada tahun 2023 dengan judul "Optimalisasi Fungsi DPRD Kota Metro Tehadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)" Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan DPRD tercermin dalam tiga bentuk: pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah; kedua, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan; dan ketiga, pengawasan terhadap hasil audit laporan keuangan oleh BPK. Pengawasan DPRD harus dioptimalkan dengan menegaskan kewenangan dan merancang rencana pengawasan yang solid, serta meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang peraturan yang mengatur kebijakan pembangunan. Selain itu, penyusunan SOP untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK juga dianggap krusial.[5]

[5] Monalisa, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang)," 2023, 1–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur jalan dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Keduanya sama-sama menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, serta menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya. Serta perbedaan kedua penelitian tersebut yaitu Penelitian Monalisa (2023) berfokus pada optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Metro terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan titik tekan pada peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecematan Mattiro Bulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Azahra Nahdiah Munigar dan Bambang Sutedja pada tahun 2023 yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Karawang" mengulas mengenai signifikansi pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk meraih kemajuan yang berkelanjutan. Pendekatan yang diterapkan adalah normatif dengan analisis kualitatif, menggunakan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Ciampel, yang mengalami kerusakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serius akibat proyek nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan perbaikan jalan dengan membagi pelaksanaannya ke dalam beberapa segmen, mencapai total perbaikan sekitar 87%. Akan tetapi, ada hambatan, seperti anggaran yang minim dan lokasi konstruksi yang sulit, yang menghalangi proses perbaikan. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan jaringan informasi yang baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur, juga perlunya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan kebijakan tersebut. Sebagai kesimpulan, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memperbaiki kerusakan jalan, tetapi harus menangani beragam tantangan agar proyek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif.[6]

Kedua penelitian tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan jalan serta menekankan pentingnya efektivitas kebijakan dan pemanfaatan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian Azahra Nahdiah Munigar dan Bambang Sutedja (2023) lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang dengan pendekatan normatif dan empiris, tanpa mengkaji secara mendalam aspek pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan daerah tertentu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus

[6] Azahra Nahdiah Munigar and Bambang Sutedja, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Karawang," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memfokuskan kajian pada Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecematan Mattiro Bulu .

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dani Amran Hakim dan Hevina Nopriza pada tahun 2023 yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Infrastruktur Jalan Menurut Sudut Pandang Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara" menguraikan signifikansi pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung transportasi. Studi ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer serta sekunder. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki wewenang untuk merencanakan dan memelihara jalan, banyak jalan di wilayah tersebut masih dalam kondisi buruk dan tidak aman, yang mengakibatkan potensi kecelakaan bagi pengguna. Dalam pandangan hukum Islam, pembangunan jalan dikatakan memberikan keuntungan bagi masyarakat, selama masyarakat merasakan efek positif dari peningkatan jalan tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat dan manajemen yang baik oleh pemerintah daerah untuk mencapai kebaikan bersama.[7]

Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta dilaksanakan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab sesuai dengan

[7] D. A., Hakim and H. Nopriza, "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara," *Jurnal Hukum POSITUM* 7, no. 2 (2022): 205–27

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip fiqh siyasah. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis hukum. Penelitian Dani Amran Hakim dan Hevina Nopriza (2023) berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Utara dengan pendekatan penelitian lapangan dan menitikberatkan analisis pada sudut pandang hukum Islam tanpa mengkaji secara khusus pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan daerah tertentu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara spesifik menganalisis Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecematan Mattiro Bulu.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Dalam bukunya American Law An Introduction Friedman menuturkan teori Legal System yang mana disebutkan bahwasanya system hukum dari tiga indikator yakni indikator hukum (Legal structure), substansi hukum (legal substance), peraturan-peraturan pokok yang berbentuk borma kebiasaan tersebut benar serta bisa atau tidaknya norma tersebut diterapkan. Lawrence berpendapat bahwasanya gangguan yang terjadi dalam struktur dan substansi hukum muncul akibat keduanya bersifat statis. Faktor yang terjaai dalam struktur dan substansi hukum muncul akibat keduanya bersifat statis. Faktor yang berpotensi memberi gangguan adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidak terhalang dan berpotensi memberi gangguan adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidak terhalang dan terisolasi namun sangat bergantung pada masukan eksternal. Kekuatan sosial yang berkesinambungan memodifikasi dan menginovasi tatanan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum, memutuskan yang harus diubabh inilah yang disebut dengan budaya hukum.[8]

Teori *legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu kerangka analisis paling berpengaruh dalam kajian sosiologi hukum, karena memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang hidup dan saling berkaitan antara tiga komponen utamanya. Ketiga komponen tersebut, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, tidak dapat dipahami secara terpisah karena masing-masing saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas berlakunya hukum di tengah masyarakat.

Pertama, struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada kerangka kelembagaan yang menjalankan hukum, meliputi badan legislatif, lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, serta aparatur penegak hukum lainnya beserta pola hubungan kewenangan di antaranya. Struktur ini diibaratkan sebagai "kerangka tubuh" dari sistem hukum, yang menentukan bagaimana hukum diproses, dijalankan, dan ditegakkan secara kelembagaan.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) adalah keseluruhan aturan, norma, dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang berada dalam sistem tersebut, termasuk produk hukum yang dihasilkan seperti undang-undang maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga hukum.[5] Substansi hukum inilah yang menjadi "isi" atau muatan normatif yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) adalah elemen yang paling menentukan dinamika sistem hukum karena mencakup sikap, nilai, kepercayaan, kebiasaan, serta opini masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum berfungsi sebagai kekuatan penggerak

[8] Fara Rizqiyah Sari and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*driving force*) yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana masyarakat menggunakan hukum, mengabaikannya, atau bahkan menyalahgunakannya.

Relevansi ketiga elemen tersebut terletak pada sifatnya yang dinamis dan saling bergantung. Struktur dan substansi hukum cenderung bersifat statis karena terikat pada bentuk formal dan prosedural, sedangkan budaya hukum bersifat lebih cair karena senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Interaksi antara elemen yang statis dan elemen yang dinamis inilah yang menyebabkan sistem hukum senantiasa mengalami tekanan untuk beradaptasi, sehingga hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas yang tertutup, melainkan sistem terbuka yang terus-menerus menerima masukan dari lingkungan sosial di sekitarnya.

Teori *legal system* Friedman tersebut relevan pula apabila diterapkan dalam menganalisis pelaksanaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perbaikan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang infrastruktur. Dari sisi struktur hukum, Dinas PUPR merupakan lembaga yang secara kelembagaan diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan jalan sesuai dengan tingkatan kewenangannya, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dari sisi substansi hukum, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur standar teknis, mekanisme penganggaran, hingga sanksi atas kelalaian pemeliharaan jalan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum[9]. Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.[10]

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasiyang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (equality before the law).

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan

[9] Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya* 80 (1988).

[10] Muhammad MIftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik, maka undang undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukum itu sendiri, 2) Faktor penegak hukum, ialah pihakpihak yang membuat maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan, 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [11]

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d. Pemublikasian peraturan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Selain faktor hukum itu sendiri, Soerjono Soekanto juga merumuskan ukuran-ukuran pada keempat faktor lainnya yang turut menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu:

Faktor penegak hukum, ukuran efektivitasnya dapat dilihat dari:

[11] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Sejauh mana penegak hukum terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
b. Sejauh mana penegak hukum diperkenankan untuk mengambil diskresi kebijaksanaan) dalam menerapkan hukum terhadap suatu kasus konkret.
c. Teladan yang baik yang diperlihatkan oleh penegak hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi panutan bagi masyarakat luas.
d. Sejauh mana derajat sinkronisasi tugas antarpenegak hukum dari berbagai institusi terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas, ukuran efektivitasnya meliputi:

a. Kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
b. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
c. Kecukupan anggaran atau dana yang dialokasikan untuk mendukung proses penegakan hukum.
d. Pemanfaatan teknologi yang memadai guna mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum.

Faktor masyarakat, ukuran efektivitasnya dapat dilihat dari:

a. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap adanya suatu peraturan perundang-undangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan dari kaidah hukum tersebut.

c. Sikap masyarakat dalam menanggapi dan menilai suatu peraturan hukum, apakah bersifat mendukung atau justru menolak.

d. Pola perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan derajat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Faktor kebudayaan, ukuran efektivitasnya berkaitan dengan:

a. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya nilai ketertiban dan nilai kebebasan yang seringkali berada dalam pasangan yang serasi maupun konfliktual.

b. Hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang bersifat abstrak, yaitu berupa nilai-nilai yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan nilai-nilai yang dianggap buruk (sehingga dihindari), yang pada akhirnya membentuk dasar pertimbangan masyarakat dalam menaati atau melanggar hukum.[12]

3. Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah yaitu (politik pelaksanaan Perundang-Undangan). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur‟an dan Sunnah.

[12] Soekanto.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam ihwal pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekatkan pada kebaikan dan kemashlatahan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata mata.[13]

Tugas al-Shulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). [14]Kewajiban kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikan totalitas, syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajiakan dan mencegah kejahatan.[15]

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* tersebut relevan digunakan untuk menganalisis Peran efektivitas Dinas PUPR dalam melaksanakan perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebab konsep ini menegaskan bahwa

[13] Mayyadah Putri, Rodiah Nur Efa, and Sukandi Ahmad, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu," *Jurnal Hukum Sehasen*, 2025.

[14] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran* (Amara Books, 2012).

[15] Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kekuasaan eksekutif tidak boleh berhenti pada pelaksanaan administratif belaka, melainkan harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara nyata.[13] Dinas PUPR, sebagai representasi *al-Sulthah al-Tanfidziyyah* di tingkat daerah, memikul amanah untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan mengenai jalan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata berupa pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur jalan di Mattiro Bulu.

Dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*, keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut tidak diukur semata dari terpenuhinya prosedur administratif atau terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan perbaikan jalan tersebut benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, misalnya kelancaran mobilitas warga, keselamatan pengguna jalan, dan kelancaran roda perekonomian masyarakat setempat. Prinsip keadilan yang menjadi inti dari konsep ini juga menuntut agar pembagian prioritas perbaikan jalan di Mattiro Bulu dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif, sehingga tidak hanya jalan-jalan tertentu yang mendapat perhatian sementara ruas jalan lain di wilayah yang sama dibiarkan rusak berkepanjangan

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Efektivitas

Efektivitas dinarasikan tidak hanya sebagai hakikat hasil akhir, tetapi juga terkait dengan bagaimana sumber daya dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi, dan bagaimana proses yang mendukung tercapainya tujuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berjalan baik. Definisi ini menekankan bahwa efektivitas adalah ukuran kinerja yang melibatkan aliran antara input, proses, output, dan dampak, serta persepsi manfaat bagi publik dalam konteks publik (khususnya layanan publik)[16]

Secara spesifik untuk konteks jalan/infrastruktur, efektivitas program perbaikan jalan tidak hanya ditentukan oleh selesainya fisik konstruksi, tetapi juga dampak nyata bagi mobilitas, kelancaran distribusi, dan keselamatan pengguna jalan. Dengan demikian, ukuran efektivitas harus mencakup manfaat sosial ekonomi dan kepuasan pengguna layanan publik (masyarakat sebagai penerima manfaat).[17] Tingkat pencapaian tujuan program (misalnya target perbaikan jalan, peningkatan mutu layanan jalan, dan pengurangan kerusakan); indikator ini sering dipakai untuk menilai efektivitas program infrastruktur jalan di tingkat .Manfaat yang dirasakan masyarakat (kemudahan mobilitas, distribusi barang/jasa, keselamatan pengendara); penilaian persepsi publik terhadap dampak program sangat penting untuk memahami efektivitas secara holistic.

Dalam kerangka yang lebih luas, efektivitas juga dapat dianalisis melalui pendekatan sistem, di mana setiap komponen saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Input seperti anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi faktor awal yang menentukan kualitas proses pelaksanaan program. Proses yang baik, seperti perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta koordinasi antar lembaga, akan menghasilkan output berupa pembangunan atau perbaikan jalan yang sesuai dengan standar. Selanjutnya, output tersebut akan menghasilkan outcome berupa meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

[16] Mia Anisa and Yuzan Noor, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Jalan Dan Drainase Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Japb* 8, no. 2 (2025): 1762–73,

[17] Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama, Ida Bagus Gde Agung Yoga Pramana, and I Made Satya Graha, "Implementasi Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Konstruksi Jalan Di Kota Denpasar," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 466–74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penilaian efektivitas juga dapat diperkuat melalui penggunaan data empiris, seperti tingkat penurunan kerusakan jalan, waktu tempuh yang lebih singkat, serta peningkatan volume lalu lintas yang lancar. Data-data tersebut dapat dikombinasikan dengan hasil survei kepuasan masyarakat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program. Dengan demikian, evaluasi efektivitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, efektivitas program perbaikan infrastruktur jalan dapat dipahami secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebagai pencapaian target fisik, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis dan menilai keberhasilan program pembangunan secara objektif dan komprehensif.

Selain itu, efektivitas program perbaikan jalan juga dapat dilihat dari aspek keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Infrastruktur jalan yang dibangun atau diperbaiki harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang serta tetap berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan. Apabila kondisi jalan dapat dipertahankan melalui pemeliharaan yang baik dan terus mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila jalan kembali mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat, maka efektivitas program menjadi berkurang meskipun target fisik pembangunan telah tercapai.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas program. Masyarakat sebagai pengguna akhir infrastruktur memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik terkait kondisi jalan yang telah diperbaiki. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan kerusakan jalan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemeliharaan secara lebih responsif dan tepat waktu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Efektivitas program perbaikan infrastruktur jalan juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jalan yang berada dalam kondisi baik akan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat[18].

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas hasil pekerjaan. Jalan yang selesai dibangun harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan agar dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat. Kualitas konstruksi yang baik akan memperpanjang umur layanan jalan serta mengurangi kebutuhan perbaikan berulang dalam jangka pendek. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya tercermin dari terselesaikannya pekerjaan, tetapi juga dari mutu infrastruktur yang dihasilkan. Kualitas yang rendah dapat menyebabkan kerusakan lebih cepat sehingga manfaat program menjadi tidak optimal dan penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.

Dalam konteks tata kelola pembangunan infrastruktur, efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Perencanaan yang baik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, serta peran strategis suatu ruas jalan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tanpa perencanaan yang berbasis data, program perbaikan jalan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

[18] Supriadi Siagian, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, efektivitas program perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa terselesaikannya pembangunan fisik, tetapi juga oleh keseluruhan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa efektivitas merupakan konsep multidimensional yang saling berkaitan dan tidak dapat diukur hanya dari satu aspek saja.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kabupaten Pinrang ialah salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk Kabupaten Pinrang.[19]

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan daerah, karena berperan langsung dalam mewujudkan pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan SKPD ini sejalan dengan ketentuan otonomi daerah, di mana pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Secara umum, tugas pokok Dinas PUPR mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, tata ruang wilayah, hingga penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan Dinas PUPR sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, sebab ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong kelancaran mobilitas

[19] Arfandi Dinsar, "Pengaruh Mutasi Dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang," *Amsir Management Journal* 1, no. 2 (2021): 46–52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang turut dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Selain itu, Dinas PUPR juga memiliki peran penting dalam menyusun rencana strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, dinas tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai perencana yang harus mampu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur secara tepat, menetapkan skala prioritas, serta memastikan kesinambungan program pembangunan dari tahun ke tahun. Perencanaan yang matang akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan, khususnya dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang berperan dalam melakukan survei kondisi jalan, menentukan tingkat kerusakan, serta merumuskan metode penanganan yang sesuai, baik berupa pemeliharaan rutin, rehabilitasi, maupun peningkatan kualitas jalan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antar bidang di dalam dinas maupun dengan instansi lain, seperti pemerintah kecamatan dan desa, agar data yang diperoleh akurat dan program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Dinas PUPR juga dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur harus digunakan secara optimal dengan memperhatikan prinsip value for money, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan internal dan eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain aspek teknis dan administratif, peran Dinas PUPR juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur yang dibutuhkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan akan lebih responsif dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Di samping itu, Dinas PUPR juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dinas dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem informasi manajemen infrastruktur, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan demikian, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinas ini tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dinas PUPR juga memiliki peran penting dalam mendukung integrasi pembangunan antar sektor. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung sektor lain seperti pertanian, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contoh, peningkatan kualitas jalan akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi hasil pertanian serta akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan Kesehatan.

Dengan demikian, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat kompleks dan strategis dalam pembangunan daerah. Tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai perencana, pengendali, serta fasilitator

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Infraktruktur Jalan

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik dan organisasi yang mendukung fungsi suatu masyarakat atau perusahaan. Ini mencakup berbagai fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem air bersih, sanitasi, jaringan listrik, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menghubungkan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan daya saing suatu negara atau wilayah.

Infrastruktur juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. *Infrastruktur transportasi* meliputi jalan, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan, yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang. *Infrastruktur energi* mencakup pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi energi, yang menyediakan pasokan energi yang handal. *Infrastruktur air dan sanitasi* meliputi sistem pengolahan air bersih, jaringan distribusi air, sistem pengelolaan air limbah, dan drainase perkotaan, yang menjamin kesehatan dan kebersihan lingkungan. *Infrastruktur telekomunikasi* mencakup jaringan telepon, internet, dan komunikasi nirkabel, yang mendukung konektivitas dan pertukaran informasi.[20]

Perencanaan dan pengembangan infrastruktur melibatkan proses yang kompleks dan multidisiplin. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, desain teknis, analisis dampak lingkungan, dan konsultasi publik. Pengembangan infrastruktur seringkali melibatkan investasi modal yang besar dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penting

[20] Dewi Sarah Simbolon et al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur.[21]

Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur merupakan aspek penting untuk memastikan kinerja dan umur layanan infrastruktur. Pemeliharaan rutin, seperti perbaikan jalan, pengecatan jembatan, dan pembersihan saluran air, dapat mencegah kerusakan yang lebih parah dan memperpanjang umur infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur melibatkan pemantauan kondisi, evaluasi kinerja, dan perencanaan perbaikan atau penggantian infrastruktur yang sudah tua atau rusak. Investasi dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang efektif dapat mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan keandalan layanan.[22]

Pengembangan infrastruktur dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi. Inovasi teknologi, seperti penggunaan material yang lebih kuat dan tahan lama, metode konstruksi yang lebih efisien, dan sistem pemantauan cerdas, dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, pendekatan inovatif dalam pembiayaan infrastruktur, seperti kemitraan pemerintah swasta (KPS) dan obligasi infrastruktur, dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur.[23]

Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Jalan dapat didefinisikan sebagai jalur atau lintasan yang digunakan untuk kendaraan dan

[21] Mustika Wulandari et al., "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus Di Provinsi Lampung," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 3752–63.

[22] Juang Akbardin et al., "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Struktur Kelompok Masyarakat Penyelanggara," *Lentera Karya Edukasi* 1, no. 3 (2021): 139–46

[23] Arief Eko Wibowo and Rachmat Mudiyono, "Tantangan Pengembangan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Jawa Tengah," *Pondasi* 29, no. 2 (2024): 201–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pejalan kaki. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penghubung antar daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus lalu lintas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik dan terawat dapat mengurangi waktu tempuh, biaya transportasi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Jalan dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jenis pengguna, fungsi, dan karakteristik teknis. Secara umum, jalan dapat dikategorikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Selain itu, jalan juga dapat dibedakan menjadi jalan raya, jalan lokal, dan jalan akses. Setiap jenis jalan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jalan juga dapat dirancang untuk berbagai tipe kendaraan, mulai dari kendaraan ringan hingga berat.[24]

Perencanaan dan pembangunan jalan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup analisis terhadap kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Proses ini biasanya melibatkan studi kelayakan yang mencakup analisis biaya-manfaat, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Pengembangan jalan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek keselamatan, efisiensi, dan dampak lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan jalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian.[25]

Selain aspek perencanaan dan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan juga merupakan bagian integral dari manajemen jalan yang efektif. Pemeliharaan rutin, seperti penambalan lubang, perbaikan drainase, dan

[24] Adi Aspian Nur, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Bulungan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 1–12.

[25] Diyanti Diyanti et al., "Pengelolaan Dan Preservasi Drainase Jalan Berkelanjutan Berbasis Komunitas," *Jurnal JANATA* 2, no. 2 (2022): 44–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembersihan bahu jalan, sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang umur jalan. Rehabilitasi jalan, yang melibatkan perbaikan struktural yang lebih besar, diperlukan ketika jalan telah mengalami kerusakan signifikan. Strategi pemeliharaan dan rehabilitasi yang tepat dapat mengurangi biaya jangka panjang dan memastikan jalan tetap aman dan nyaman bagi pengguna.[26]

Selain itu, infrastruktur jalan juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jalan yang terhubung dengan baik akan membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pasar ekonomi, sehingga mendorong pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan jalan tidak hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, kualitas infrastruktur jalan juga sangat dipengaruhi oleh standar teknis yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Standar tersebut meliputi kekuatan struktur jalan, kualitas material, sistem drainase, serta aspek keselamatan seperti rambu lalu lintas dan marka jalan. Penerapan standar yang baik akan menghasilkan jalan yang lebih tahan lama dan mampu menahan beban lalu lintas yang tinggi, sehingga mengurangi frekuensi perbaikan dan biaya pemeliharaan di masa depan.

Dalam praktiknya, pengelolaan infrastruktur jalan juga membutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi, seperti penggunaan data kondisi jalan secara berkala untuk menentukan prioritas perbaikan. Pendekatan ini dikenal dengan manajemen aset infrastruktur, di mana setiap ruas jalan dipantau kondisinya sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif.

---

[26] Krisantos Ria Bela et al., "Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Di Dusun I, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Local Engineering* 2, no. 2 (2024): 71–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi terkait kondisi jalan, serta ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tidak cepat rusak. Kesadaran kolektif ini akan mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan kualitas infrastruktur dalam jangka panjang.

Dengan demikian, infrastruktur, khususnya jalan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, akan menentukan sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik dan organisasi yang mendukung fungsi suatu masyarakat atau perusahaan. Ini mencakup berbagai fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem air bersih, sanitasi, jaringan listrik, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menghubungkan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan daya saing suatu negara atau wilayah.

Infrastruktur juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Infrastruktur transportasi meliputi jalan, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan, yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Infrastruktur energi mencakup pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi energi, yang menyediakan pasokan energi yang handal. Infrastruktur air dan sanitasi meliputi sistem pengolahan air bersih, jaringan distribusi air, sistem pengelolaan air limbah, dan drainase perkotaan, yang menjamin kesehatan dan kebersihan lingkungan. Infrastruktur telekomunikasi mencakup jaringan telepon, internet, dan komunikasi nirkabel, yang mendukung konektivitas dan pertukaran informasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perencanaan dan pengembangan infrastruktur melibatkan proses yang kompleks dan multidisiplin. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, desain teknis, analisis dampak lingkungan, dan konsultasi publik. Pengembangan infrastruktur seringkali melibatkan investasi modal yang besar dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur.

Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur merupakan aspek penting untuk memastikan kinerja dan umur layanan infrastruktur. Pemeliharaan rutin, seperti perbaikan jalan, pengecatan jembatan, dan pembersihan saluran air, dapat mencegah kerusakan yang lebih parah dan memperpanjang umur infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur melibatkan pemantauan kondisi, evaluasi kinerja, dan perencanaan perbaikan atau penggantian infrastruktur yang sudah tua atau rusak. Investasi dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang efektif dapat mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan keandalan layanan.

infrastruktur, khususnya jalan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, akan menentukan sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Kabupaten Pinrang & Kecamatan Mattiro Bulu

a. Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak sekitar ±185 km di sebelah utara Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi. Secara geografis, Kabupaten Pinrang berada pada posisi sekitar 3°19'–

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4°10' Lintang Selatan dan 119°26'–119°47' Bujur Timur. Wilayahnya memiliki karakteristik topografi yang beragam, mulai dari daerah pesisir di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar hingga wilayah dataran rendah dan perbukitan di bagian timur.

Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, dengan puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Watang Sawitto. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Sulawesi Selatan, dengan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kelapa, serta hasil tambak dan perikanan laut. Selain sektor pertanian, perdagangan dan jasa juga berkembang terutama di wilayah perkotaan.

Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Pinrang memiliki jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan, termasuk akses menuju wilayah pesisir dan pedalaman. Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta konektivitas antar wilayah.

Lebih lanjut, perkembangan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur yang tersedia. Jalan yang baik akan memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perikanan dari desa ke pasar, baik di dalam maupun di luar daerah. Hal ini akan meningkatkan efisiensi biaya transportasi serta memperluas akses pasar bagi para petani dan pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pinrang juga berperan dalam mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah. Kecamatan yang memiliki akses jalan yang baik cenderung mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang akses jalannya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Pinrang juga memiliki potensi strategis dalam pengembangan wilayah berbasis konektivitas antar daerah. Letaknya yang berada pada jalur lintas provinsi menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah penghubung antara wilayah Sulawesi Selatan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Kondisi ini menuntut adanya infrastruktur jalan yang memadai agar arus transportasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah serta menarik minat investasi dari pihak luar.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas wilayah. Daerah yang memiliki akses jalan yang baik cenderung lebih mudah berkembang karena masyarakatnya dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih cepat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan akses jalan akan mengalami hambatan dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Karakteristik wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, dan perbukitan juga menimbulkan kebutuhan infrastruktur yang beragam. Wilayah pesisir membutuhkan akses jalan yang mampu mendukung kegiatan perikanan dan distribusi hasil laut, sedangkan wilayah pertanian memerlukan jaringan transportasi yang memadai untuk memperlancar pengangkutan hasil produksi menuju pasar atau pusat pengolahan. Di sisi lain, daerah perbukitan memerlukan infrastruktur yang mampu menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Pembangunan jalan di Kabupaten Pinrang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan wilayah. Infrastruktur jalan yang baik dapat membuka keterisolasian suatu daerah, meningkatkan interaksi antarwilayah, serta mempercepat penyebaran aktivitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi. Dalam teori pembangunan wilayah, aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat perkembangan suatu daerah. Semakin baik akses yang dimiliki suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang wilayah tersebut untuk berkembang melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan akan lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, dan pusat perdagangan apabila didukung oleh kondisi jalan yang baik. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.

b. Kecamatan Mattiro Bulu

Kecamatan Mattiro Bulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang. Secara administratif, kecamatan ini terdiri atas beberapa desa dan kelurahan (sekitar 7 desa dan 2 kelurahan) yang terbagi dalam sejumlah dusun dan lingkungan. Kecamatan ini berada tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karakteristik wilayah Mattiro Bulu didominasi oleh kawasan permukiman dan lahan pertanian, dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil. Infrastruktur jalan di kecamatan ini menjadi sarana penting untuk menunjang mobilitas warga, baik untuk aktivitas ekonomi (seperti distribusi hasil pertanian) maupun akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat pemerintahan.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Pinrang, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mattiro Bulu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Oleh karena itu, kondisi dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kualitas jalan di wilayah ini memiliki pengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas masyarakat serta tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Selain itu, letak geografis Kecamatan Mattiro Bulu yang relatif dekat dengan pusat kabupaten menjadikannya sebagai wilayah penyangga yang berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang menghubungkan kecamatan ini dengan pusat kota maupun kecamatan lain memiliki fungsi strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal serta mempercepat pertumbuhan wilayah.

Lebih lanjut, keberadaan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat menjadikan infrastruktur jalan sebagai faktor penentu dalam rantai distribusi hasil produksi. Jalan yang rusak atau tidak memadai dapat menghambat proses pengangkutan hasil pertanian ke pasar, sehingga berpotensi menurunkan nilai jual produk dan pendapatan petani. Sebaliknya, jalan yang baik akan memperlancar distribusi, mengurangi biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Di samping itu, aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga sangat bergantung pada kondisi jalan. Infrastruktur jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau sekolah, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan lainnya. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Selain berperan sebagai wilayah pertanian, Kecamatan Mattiro Bulu juga memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pinrang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Mattiro Bulu memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkembangan dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan wilayah dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi tata wilayah, Kecamatan Mattiro Bulu terdiri atas beberapa desa dan kelurahan yang saling terhubung melalui jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa. Konektivitas antarwilayah ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi dan sosial yang lebih efektif. Masyarakat dapat lebih mudah menjangkau pasar, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Dengan tersedianya akses transportasi yang baik, biaya perjalanan dan waktu tempuh dapat ditekan sehingga produktivitas masyarakat menjadi lebih tinggi. Data administrasi wilayah yang dipublikasikan BPS Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Kecamatan Mattiro Bulu memiliki peran penting sebagai salah satu kawasan penyangga aktivitas perkotaan Kabupaten Pinrang.

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha lokal yang mengandalkan akses jalan untuk mendistribusikan produk mereka ke berbagai wilayah di Kabupaten Pinrang maupun daerah sekitarnya. Jalan yang baik akan memperlancar arus distribusi barang sehingga produk dapat sampai ke konsumen dengan lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Sebaliknya, kerusakan jalan dapat menimbulkan berbagai kendala seperti meningkatnya biaya transportasi, keterlambatan pengiriman barang, serta berkurangnya daya saing produk lokal.

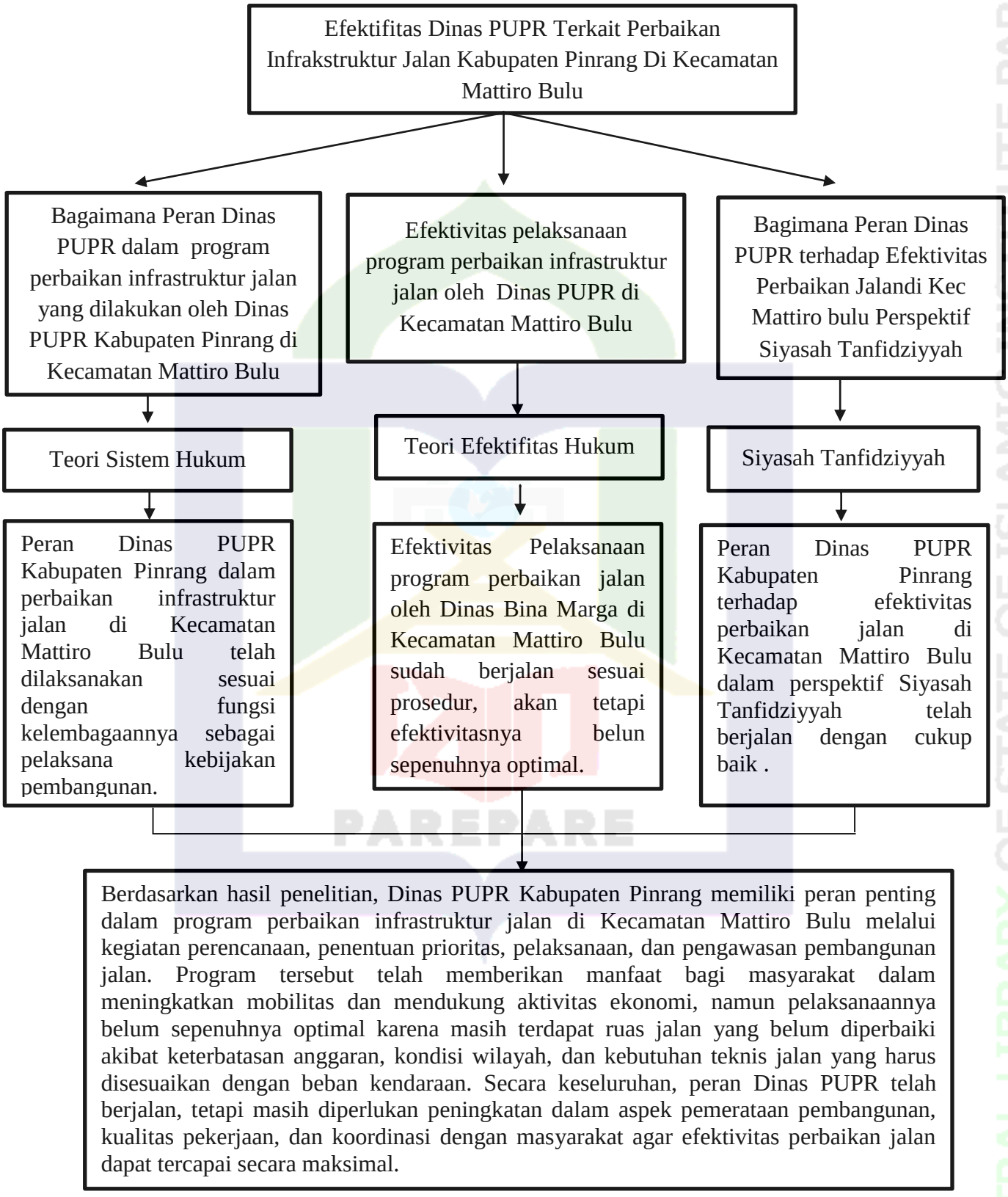
D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini akan mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang Efektifitas Dinas PUPR Kabupaten Pinrang terhadap perbaikan infrastruktur jalan di kecamatan mattiro bulu. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya secara maksimal untuk membahas dan mengidentifikasi permasalahan secara sistematis, dengan harapan bahwa hasil kajian ini dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, terhadap efektifitas perbaikan infraktruktur jalan Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu.[27]

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengamatan atau observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi terhadap subyek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode non statistic yaitu analisis data deskriptif artinya dari data yang diperoleh melalui penelitian tentang Efektifitas Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrakstruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu.[28]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang dan waktu penelitian ini diperlukan lebih satu bulan setengah dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian yang diteliti oleh penulis akan berfokus pada Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Mattiro Bulu

---

[27] Sadikin Sadikin, Sjuaib Hannan, and Ulya Sunani, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda," *Journal Peqguruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 834,

[28] Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, And Maulida Putri Rahmawati, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan Di Kelurahan Langenharjo)," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, No. 2 (2023): 346–61,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akurat dalam penyusunan penelitian, diperlukan penggunaan berbagai data melalui beragam perolehan yang bisa menolong untuk pengolahan dan analisis data tersebut. Sumber data tersebut dapat berupa penelitian yang memiliki data yang selaras pada pengkajian. sumbernya mencakup kegiatan individu, benda, ranah serta lainnya.[29] Adapun data pengkajian ini terbagi menjadi dua jenis mencakup:

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Wawancara langsung dengan Kepala Bidang Bina Marga, Penata kelola jembatan dan infrastruktur jalan Bina Marga Kabupaen Pinrang, dan Masyarakat sebanyak 2 Orang.

b. Data Sekunder

   Data sekunder dikumpulkan menggunakan informasi dari organisasi dan sumber terkait, seperti data yang dikumpulkan dari penelitian terkait. Data sekunder melengkapi data primer yang sering dikumpulkan melalui studi literature untuk menyusun informasi tentang buku, pedoman, dan makalah terkait penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mematuhi peraturan hukum pedesaan.[30]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan berdampak besar pada validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Peneliti dapat memilih dari

---

[29] M.Si Yuan Isha Mahastu , Drs. Joko Suranto, M.Si , Dra. Damayanti Suhita, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten WonogiriNo. 6 Tahun2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur Di Keluarahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri," *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86

[30] Amelia Putri et al., "Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Infrastruktur Jalan Di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Pendahuluan Tinjauan Pustaka" 18, no. 7 (2024): 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbagai teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan, tujuan penelitian, dan konteks studi. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan:

A. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang bekerja berdasarkan sebuah data tentang fakta yang mengenai dunia nyata. Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan sebagai sumber data penelitian untuk mengetahui bagaimana perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten Pinrang di Kecematan Mattiro Bulu.[31]

Dalam penelitian kualitatif, observasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan melihat, tetapi juga sebagai proses memahami secara mendalam situasi sosial yang terjadi di lapangan. Melalui keterlibatan langsung, peneliti dapat menangkap berbagai fenomena yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara, seperti perilaku aparat kelurahan, proses administratif, serta interaksi antar pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian anggaran. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kontekstual dan faktual.

B. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, opini, atau pengalaman terkait topik penelitian. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dan mendengarkan tanggapan mereka dengan seksama, sering kali memungkinkan eksplorasi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif subjek. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti tatap muka, melalui telepon, atau secara daring, sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Metode ini

[31] Maria Vianey Rae et al., "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 1–18

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sering dipilih dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual.

Secara umum, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan baku, sehingga setiap responden diberikan pertanyaan yang relatif sama. Wawancara semi-terstruktur memberikan kebebasan yang lebih besar kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan alur percakapan, namun tetap berpedoman pada garis besar topik yang telah disiapkan. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan secara lebih bebas tanpa pedoman pertanyaan yang baku, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan alami sesuai dengan perkembangan situasi wawancara

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.[32]

Teknik dokumentasi memiliki peran penting sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sebab dokumen dapat menjadi bukti konkret yang mendukung keabsahan temuan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, arsip pemerintah, peraturan perundang-undangan, maupun

[32] Yolanda Rama Destiani, "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)" 17 (1385): 302.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dokumen tidak resmi seperti foto kegiatan, catatan lapangan, dan rekaman audio-visual yang relevan dengan fokus penelitian.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian kualitatif memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya bersifat stabil karena tidak berubah meskipun telah diperiksa berulang kali, dapat menjadi bukti untuk suatu pengujian, serta relatif murah dan mudah diperoleh dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk membenarkan keabsahan data yang disajikan, maka keabsahan data diartikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan analisis keabsahan data adalah untuk memverifikasi dan mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan peneliti.[33]

Pengumpulan data yang dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam dengan aparat desa dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aparat desa dapat pengelolaan anggaran desa terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, keabsahan data menjadi sangat penting karena penelitian kualitatif sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap realitas sosial yang diteliti. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, baik melalui klarifikasi kepada informan maupun dengan membandingkannya dengan sumber data lain yang relevan.

[33] kasmiani, "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di Kabupaten SidraP)," no. February (2024): 4–6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini tidak hanya ditentukan oleh metode pengumpulan data, tetapi juga oleh proses verifikasi, analisis, dan interpretasi yang dilakukan secara cermat dan sistematis oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[34]

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.[35]

Temuan-temuan akan dari berbagai divalidasi melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan dan memperkuat temuan sumber data, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Ini akan meningkatkan keandalan dan kepercayaan terhadap hasil analisis yang dihasilkan.

Dalam proses analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, peneliti tidak memulai dari hipotesis yang kaku, melainkan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi pola, tema, dan konsep. Data yang

[34] Monalisa, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang)."

[35] Sadikin, Hannan, and Sunani, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah dikumpulkan akan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang dianalisis menjadi lebih terarah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas PURR dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Yang Akan Dilakukan Oleh Dinas PUPR Kabupaen Pinrang

a. Hasil Penelitan

Berdasarkan dengan hasil wawancara, proses perencanaan program perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pinrang diawali dengan survei kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas PUPR, khususnya Bidang Bina Marga. Informan dari Dinas PUPR menjelaskan,

> "Perencanaan program berdasarkan survei kondisi jalan. Setiap tahun dilakukan survei jalan. Khusus untuk wilayah Mattiro Bulu, ruas yang paling rusak berada pada ruas Lawawoi dan Alitta, sehingga tingkat kemantapan jalan di wilayah tersebut masih rendah."[36]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUPR menggunakan data kondisi jalan sebagai dasar awal dalam menyusun rencana perbaikan jalan. Selain itu, perencanaan juga mempertimbangkan status kewenangan jalan. Informan menyampaikan,

> "Untuk wilayah Mattiro Bulu, ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten mengacu pada Keputusan Bupati Pinrang Nomor 200/66/2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, termasuk wilayah Padaidi."[37]

Faktor anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jenis penanganan jalan. Informan dari Dinas PUPR menyatakan,

> "Faktor utama adalah besaran anggaran yang tersedia di Bidang Bina Marga. Penanganan juga tergantung pada tingkat kerusakan jalan. Kalau rusak ringan, dilakukan pemeliharaan rutin seperti penambalan. Kalau rusak berat,

[36] Muhammad Sastera, Kepala Bidang Bina Marga, Pinrang Mei 2026
[37] Muhammad Sastera, Kepala Bidang Bina Marga, Pinrang Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dilakukan peningkatan, seperti pengaspalan kembali. Semua tetap menyesuaikan kemampuan daerah."[38]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dasar prosedural yang digunakan dalam perencanaan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, yang meliputi survei kondisi jalan, penentuan status kewenangan, penyusunan prioritas, penganggaran, lelang pekerjaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan dapat didasarkan pada data teknis dan keluhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Komalasari, yang menyatakan bahwa hasil survei kondisi jalan sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Survei kondisi jalan pada tahun sebelumnya dapat menjadi dasar untuk rencana pemeliharaan jalan tahun berikutnya[39].

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, proses perencanaan program perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori perencanaan kebijakan publik, yaitu teori perencanaan rasional dan teori perencanaan inkremental. Teori perencanaan rasional digunakan untuk melihat sejauh mana proses perencanaan yang dijalankan Dinas PUPR telah didasarkan pada tahapan logis dan sistematis, mulai dari identifikasi masalah melalui survei kondisi jalan hingga evaluasi hasil. Sementara itu, teori perencanaan inkremental digunakan untuk menjelaskan mengapa proses perencanaan tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan ideal, melainkan disesuaikan secara bertahap dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

[38] Muhammad Sastera, Kepala Bidang Bina Marga, Pinrang Mei 2026

[39] Nurul Komalasari and Anis Sagaf, "Analisis Keterkaitan Hasil Survei Kondisi Jalan Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 2, no. 2 (2024): 115–23,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks wilayah Padaidi dan Mattiro Bulu, hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan jalan perlu memperhitungkan karakter wilayah. Padaidi tidak hanya berfungsi sebagai permukiman, tetapi juga sebagai kawasan produktif yang mendukung aktivitas pertanian dan pergerakan kendaraan berat. Karena itu, perencanaan jalan di wilayah tersebut sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan pemeliharaan permukaan, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung struktur jalan, beban kendaraan, drainase, dan intensitas lalu lintas

Dari sisi regulasi pembangunan daerah, proses perencanaan perbaikan jalan harus terhubung dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD[40]. Dengan demikian, program perbaikan jalan tidak cukup hanya muncul dari hasil survei teknis, tetapi juga harus masuk ke sistem perencanaan tahunan dan menengah daerah.

Pada tingkat Kabupaten Pinrang, dasar perencanaan daerah juga dapat dikaitkan dengan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025 sampai 2029. Perda tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Musrenbang, kelurahan, pemerintah setempat, dan anggota DPRD. Namun, pelibatan masyarakat dalam perencanaan fisik teknis belum berjalan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi

[40] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat masih berada pada tahap penyampaian aspirasi, belum sampai pada tahap pembahasan prioritas dan desain kebutuhan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah memasukkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan jalan, sehingga pemerintah daerah perlu membuka ruang yang lebih jelas agar aspirasi masyarakat dapat diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dijelaskan hasilnya secara transparan[41].

Proses perencanaan program perbaikan infrastruktur jalan dapat dianalisis melalui teori perencanaan rasional. Teori ini menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan melalui tahapan yang logis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penentuan kriteria, penyusunan alternatif, pemilihan alternatif terbaik, pelaksanaan, sampai evaluasi hasil. Dalam konteks penelitian ini, survei kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya penerapan unsur perencanaan rasional, karena keputusan perbaikan jalan didasarkan pada data kondisi jalan, tingkat kerusakan, status kewenangan jalan, serta kemampuan anggaran daerah. Model perencanaan rasional menempatkan data dan evaluasi sebagai dasar utama dalam menentukan keputusan program.

peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro Bulu dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Dari aspek struktur hukum (legal structure), Dinas PUPR Kabupaten Pinrang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang

[41] Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Berdasarkan hasil wawancara, peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan survei kondisi jalan, penetapan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, penyusunan kebutuhan anggaran, pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.

Dari aspek substansi hukum (legal substance), pelaksanaan program perbaikan jalan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jalan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR mengacu pada aturan yang berlaku, mulai dari penentuan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah hingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, program perbaikan jalan tidak dilaksanakan secara bebas, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum (legal culture), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perbaikan jalan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja Dinas PUPR, tetapi juga oleh kondisi sosial dan partisipasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan jalan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan Dinas PUPR harus menetapkan skala prioritas sehingga belum seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat ditangani dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR dipengaruhi oleh dukungan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro Bulu telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi kelembagaannya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan atau kinerja Dinas PUPR, tetapi juga oleh dukungan masyarakat serta tersedianya sumber daya yang memadai sehingga tujuan pembangunan infrastruktur dapat tercapai secara optimal.

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Dinas PUPR Di Kecamatan Mattiro Bulu

a. Hasil Penelitian

Efektivitas pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Mattiro Bulu dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran program, kendala yang dihadapi, pengawasan pekerjaan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas PUPR telah melaksanakan program melalui tahapan formal, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, sampai pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi prosedur, pelaksanaan program telah berjalan sesuai mekanisme kerja pemerintah daerah.

Informan dari Dinas PUPR menjelaskan bahwa pelaksanaan perbaikan jalan baru dapat dilakukan setelah anggaran tersedia. Setelah itu, dinas menentukan ruas jalan yang akan dikerjakan, membagi alokasi dana, melakukan proses lelang, melaksanakan pekerjaan fisik, dan melakukan pengawasan. Sariopo menyampaikan:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Ketika sudah ada anggaran, berdasarkan ruas jalan yang mau dikerjakan, dilakukan pembagian dana, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan. Tahapannya dimulai dari perencanaan, lelang, pelaksanaan, kemudian dilakukan pengawasan."[42]

Meskipun tahapan pelaksanaan sudah berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Masyarakat menilai bahwa beberapa ruas jalan belum mendapatkan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Salah satu informan dari Masyarakat Arsyad menyampaikan:

"Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jalan yang dibangun harus disesuaikan dengan beban kendaraan, karena banyak perusahaan di dalam."[43]

Penyataan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai keberadaan program, tetapi juga menilai kualitas dan kesesuaian jalan dengan kondisi penggunaan sehari-hari. Di Kecamatan Mattiro Bulu, khususnya wilayah Padaidi, jalan tidak hanya digunakan oleh kendaraan warga, tetapi juga dilalui kendaraan berat. Kondisi ini membuat jalan lebih cepat rusak jika konstruksi jalan tidak disesuaikan dengan beban kendaraan.

Informan dari Dinas PUPR juga mengakui bahwa wilayah Padaidi memiliki karakter khusus karena menjadi salah satu kawasan lumbung pangan. Akibatnya, banyak kendaraan berat melintas untuk mengangkut hasil pertanian. Muhammad Sastera menyampaikan:

"Daerah Padaidi itu termasuk lumbung pangan dan otomatis kendaraan yang melintasi adalah kendaraan berat. Maka kondisi jalan sangat cepat berubah. Selain itu, kendalanya juga mengenai anggaran."[44]

---

[42] Sariopo, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda, Bina Marga Kabupaten Pinrang, Mei 2026

[43] Arsyad, Kep Lingkungan Pao, 7 Mei 2026

[44] Muhammad Sastera, Kepala Bidang Bina Marga, Pinrang Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan perbaikan jalan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pekerjaan fisik, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menyesuaikan jenis penanganan dengan kondisi wilayah. Jalan yang berada di kawasan pertanian dan perusahaan membutuhkan kualitas perkerasan yang lebih kuat dibandingkan jalan dengan beban lalu lintas ringan.

b. Pembahasan

Efektivitas Efektivitas pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum atau kebijakan yang dilaksanakan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program pemerintahan, termasuk program perbaikan infrastruktur jalan.

Dilihat dari faktor hukum, pelaksanaan program perbaikan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Program perbaikan jalan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR menjalankan tahapan kegiatan mulai dari identifikasi kondisi jalan, penyusunan program, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memiliki landasan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan prosedur administratif yang menjadi pedoman bagi Dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya.

Namun, keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya menjamin efektivitas program apabila pelaksanaannya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum mendapatkan penanganan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dalam pelaksanaan program telah berjalan, tetapi pencapaian tujuan pembangunan masih dipengaruhi oleh faktor lain, terutama keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan.

Selanjutnya, dari faktor penegak hukum, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan aparatur Dinas PUPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, mulai dari melakukan survei kondisi jalan, menentukan prioritas penanganan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PUPR telah melaksanakan fungsi tersebut melalui mekanisme kerja yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Dinas PUPR masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan jalan. Keterbatasan anggaran menyebabkan Dinas PUPR harus menentukan skala prioritas, sehingga tidak seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, efektivitas faktor penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh kewenangan dan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek faktor sarana atau fasilitas, efektivitas program perbaikan jalan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, peralatan, sumber daya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

teknis, serta dukungan fasilitas lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan program. Dinas PUPR harus melakukan penyesuaian antara jumlah kebutuhan perbaikan jalan dengan kemampuan keuangan daerah. Jalan dengan tingkat kerusakan ringan dapat dilakukan pemeliharaan rutin, sedangkan jalan dengan kerusakan berat membutuhkan peningkatan jalan dengan biaya yang lebih besar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR. Muhammad Sastera menjelaskan:

"Faktor utama yaitu besaran anggaran. Kalau kondisi jalan rusak ringan, dilakukan pemeliharaan rutin seperti penambalan. Kalau rusak berat, harus dilakukan peningkatan, seperti pengaspalan kembali. Itu juga tergantung kemampuan daerah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas, terutama anggaran, menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Keterbatasan anggaran menyebabkan proses penyelesaian jalan rusak berat berjalan lebih lambat karena membutuhkan biaya penanganan yang lebih besar.

Kemudian, dari faktor masyarakat, efektivitas program perbaikan jalan juga dipengaruhi oleh partisipasi dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan kebutuhan dan keluhan terkait kondisi jalan melalui pemerintah kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun anggota DPRD. Partisipasi tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum merasakan manfaat secara merata karena masih terdapat ruas jalan yang belum diperbaiki. Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa "belum cukup, karena belum sepenuhnya dibenahi" menunjukkan bahwa efektivitas program masih dipengaruhi oleh sejauh mana hasil pembangunan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat pengguna jalan.

Selain itu, masyarakat juga memberikan masukan mengenai kesesuaian kualitas jalan dengan kondisi wilayah. Beberapa ruas jalan di Kecamatan Mattiro Bulu, khususnya wilayah yang menjadi kawasan pertanian dan sering dilalui kendaraan berat, membutuhkan konstruksi yang disesuaikan dengan beban lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi Dinas PUPR dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Terakhir, dari faktor kebudayaan, pelaksanaan program perbaikan jalan dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas umum. Infrastruktur jalan yang telah diperbaiki membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat digunakan dan dipelihara secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jalan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pemerintah.

Berdasarkan data kondisi jalan Kabupaten Pinrang tahun 2023 dan 2024, pelaksanaan program perbaikan jalan menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2023, kondisi jalan baik tercatat sepanjang 383,35 km atau 47,47 persen, kemudian meningkat menjadi 392,21 km atau 48,57 persen pada tahun 2024. Selain itu, jalan rusak mengalami penurunan dari 125,30 km menjadi 117,95 km, sedangkan jalan rusak berat turun dari 122,86 km menjadi 121,37 km. Data tersebut menunjukkan bahwa program perbaikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas infrastruktur.

Namun, apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif. Dari faktor hukum, program telah memiliki dasar dan prosedur yang jelas. Dari faktor penegak hukum, Dinas PUPR telah menjalankan kewenangannya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Akan tetapi, faktor sarana berupa keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama. Selain itu, faktor masyarakat dan kebudayaan juga memengaruhi keberhasilan program karena efektivitas pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat serta kesadaran dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pinrang di Kecamatan Mattiro Bulu dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya ruas jalan yang belum tertangani, keterbatasan anggaran, tingginya beban kendaraan pada beberapa wilayah, serta perlunya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program perlu dilakukan melalui penguatan pelaksanaan tugas Dinas PUPR, optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

C. Peran Dinas PUPR Terhadap Efektivitas Perbaikan Jalan Di Kecamatan Mattiro Bulu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bulu. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum, mulai dari identifikasi kondisi jalan, penentuan prioritas penanganan, pelaksanaan kegiatan perbaikan, pengawasan pekerjaan, hingga evaluasi terhadap hasil pembangunan. Pelaksanaan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.“Perbaikan jalan sangat menunjang dan membantu masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR dan masyarakat, diketahui bahwa salah satu bentuk peran Dinas PUPR adalah melakukan pendataan dan survei terhadap kondisi jalan sebagai dasar dalam menentukan ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Tahapan tersebut menjadi penting karena tidak seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat langsung diperbaiki dalam satu waktu. Peran Dinas PUPR juga terlihat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Perbaikan dilakukan melalui beberapa bentuk penanganan, yaitu pemeliharaan rutin terhadap jalan dengan tingkat kerusakan ringan serta peningkatan atau pembangunan kembali terhadap jalan yang mengalami kerusakan berat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai pengelola infrastruktur yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan fungsi jalan.

Salah satu informan dari masyarakat, Ismail, menyampaikan:

“Perbaikan jalan sangat menunjang dan membantu masyarakat.”[45]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat infrastruktur jalan sebagai kebutuhan utama. Jalan yang baik dapat

[45] Ismail, Masyarakat Padaidi, Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperlancar mobilitas warga, memudahkan akses ke pasar, sekolah, tempat kerja, lahan pertanian, dan fasilitas umum lainnya. Dalam konteks Kecamatan Mattiro Bulu, jalan juga memiliki fungsi ekonomi karena beberapa wilayah merupakan kawasan pertanian dan dilalui kendaraan pengangkut hasil produksi.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peran Dinas PUPR dalam perbaikan jalan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran sehingga seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan belum dapat ditangani secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas PUPR harus menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

"Belum cukup, karena belum sepenuhnya dibenahi jalannya."[46]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Dinas PUPR telah melakukan upaya perbaikan jalan, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa efektivitas program perbaikan jalan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemerataan pembangunan dan percepatan penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Selain keterbatasan anggaran, efektivitas perbaikan jalan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik wilayah. Berdasarkan hasil wawancara, Kecamatan Mattiro Bulu memiliki beberapa wilayah yang menjadi kawasan pertanian dan sering dilalui kendaraan pengangkut hasil produksi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa ruas jalan memiliki tingkat beban lalu lintas yang tinggi. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu memperhatikan kesesuaian kualitas konstruksi jalan dengan fungsi dan beban

[46] Arsyad, Kepala Lingkungan Pao, Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kendaraan yang melintas agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.. Salah satu informan menyampaikan:

> "Belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jalan yang dibangun harus disesuaikan dengan beban kendaraan, karena banyak perusahaan di dalam."[47]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran Dinas PUPR tidak hanya diukur dari jumlah ruas jalan yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan jalan yang tidak mempertimbangkan kondisi lalu lintas berpotensi mengalami kerusakan kembali sehingga dapat mengurangi efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Data kondisi jalan Kabupaten Pinrang tahun 2023 dan 2024 juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas jalan sebagai hasil dari berbagai program pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah. Pada tahun 2023, kondisi jalan baik tercatat sepanjang 383,35 km atau 47,47 persen, kemudian meningkat menjadi 392,21 km atau 48,57 persen pada tahun 2024. Sementara itu, panjang jalan rusak mengalami penurunan dari 125,30 km menjadi 117,95 km, dan jalan rusak berat menurun dari 122,86 km menjadi 121,37 km. Tingkat kemantapan jalan meningkat dari 69,27 persen pada tahun 2023 menjadi 70,36 persen pada tahun 2024.

Meskipun terjadi peningkatan kondisi jalan, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 239,32 km atau sekitar 29,64 persen dari total panjang jalan Kabupaten Pinrang sebesar 807,51 km. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas PUPR dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan telah

[47] Arsyad, Kepala Lingkungan Pao, Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan hasil positif, tetapi masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar seluruh kebutuhan. [48]

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi melalui pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, anggota DPRD, maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menentukan kebutuhan pembangunan jalan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro Bulu melalui fungsi perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, luasnya kebutuhan pembangunan jalan, serta tuntutan terhadap kualitas konstruksi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas peran Dinas PUPR perlu dilakukan melalui penguatan perencanaan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pekerjaan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang terhadap efektivitas perbaikan jalan di Kecamatan Mattiro Bulu dianalisis menggunakan Teori Siyasah Tanfidziyyah. Dalam fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyyah merupakan konsep yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh pejabat atau lembaga yang diberikan

[48] BPS Kabupaten Pinrang 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

amanah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, Dinas PUPR sebagai perangkat daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan secara profesional, adil, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Amanah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang mengutamakan kepentingan umum, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya melalui pelaksanaan program perbaikan jalan pada sejumlah ruas di Kecamatan Mattiro Bulu. Masyarakat mengakui bahwa perbaikan jalan memberikan manfaat terhadap kelancaran mobilitas, akses menuju lahan pertanian, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas perbaikan jalan belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat ruas jalan yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh penanganan sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi eksekutif belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah berkewajiban mengupayakan pemerataan pelayanan publik sehingga seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama terhadap pembangunan.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa kualitas beberapa ruas jalan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan, khususnya pada wilayah yang sering dilalui kendaraan bertonase berat. Dalam konsep Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tidak hanya dinilai dari terlaksananya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu program, tetapi juga dari kualitas hasil yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas PUPR tidak hanya berkewajiban membangun jalan, tetapi juga memastikan bahwa konstruksi jalan disesuaikan dengan fungsi dan beban lalu lintas agar pembangunan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Efektivitas pelaksanaan tugas Dinas PUPR juga terlihat dari adanya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah desa atau kelurahan, serta anggota DPRD. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemimpin atau pelaksana pemerintahan dituntut untuk mendengar aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam mengambil keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang terhadap efektivitas perbaikan jalan di Kecamatan Mattiro Bulu dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah telah berjalan dengan cukup baik karena telah melaksanakan fungsi eksekutif dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat ketimpangan pemerataan pembangunan, kualitas konstruksi jalan yang belum sesuai dengan karakteristik beberapa wilayah, serta keterbatasan anggaran yang menghambat penyelesaian seluruh kebutuhan perbaikan jalan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah, Dinas PUPR perlu terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, pemerataan pembangunan, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan secara optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Mattiro Bulu telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi kelembagaannya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.Pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Mattiro Bulu sudah berjalan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran, tingginya tingkat kerusakan jalan, serta banyaknya kendaraan berat yang melintas di wilayah tertentu. Wilayah Padaidi, misalnya, merupakan kawasan lumbung pangan dan dilalui kendaraan berat, sehingga kondisi jalan lebih cepat rusak apabila konstruksi jalan tidak disesuaikan dengan beban kendaraan
2. Peran Dinas PUPR Kabupaten Pinrang terhadap efektivitas perbaikan jalan di Kecamatan Mattiro Bulu dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah telah berjalan dengan cukup baik karena telah melaksanakan fungsi eksekutif dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat ketimpangan pemerataan pembangunan, kualitas konstruksi jalan yang belum sesuai dengan karakteristik beberapa wilayah, serta keterbatasan anggaran yang menghambat penyelesaian seluruh kebutuhan perbaikan jalan. Oleh karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, untuk mewujudkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah, Dinas PUPR perlu terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, pemerataan pembangunan, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan secara optimal.

B. Saran

1. Dinas PUPR Kabupaten Pinrang perlu memperkuat proses perencanaan program perbaikan jalan dengan menggunakan data lapangan yang lebih lengkap. Survei kondisi jalan perlu dilengkapi dengan data volume kendaraan, jenis kendaraan yang melintas, status kewenangan jalan, fungsi kawasan, serta tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam Musrenbang perlu diperkuat agar aspirasi warga tidak hanya menjadi usulan formal, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas perbaikan jalan.
2. Dinas PUPR perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dengan memastikan bahwa ruas jalan yang diperbaiki benar-benar sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih pada ruas jalan yang dilalui kendaraan berat, terutama di wilayah pertanian dan kawasan perusahaan.
3. Dinas PUPR perlu menjadikan kepuasan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan program perbaikan jalan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menindaklanjuti keluhan masyarakat secara jelas, serta melakukan evaluasi setelah pekerjaan selesai. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan jalan dan merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayahnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Akbardin, Juang, Asep Yudi Permana, D Anggoro, and DTP Hutajulu. "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Struktur Kelompok Masyarakat Penyelanggara." *Lentera Karya Edukasi* 1, no. 3 (2021): 139–46..

Anisa, Mia, and Yuzan Noor. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Jalan Dan Drainase Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong." *Japb* 8, no. 2 (2025): 1762–73..

Azahra Nahdiah Munigar, and Bambang Sutedja. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Karawang." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 3090–98.

Bela, Krisantos Ria, Krisantus Satrio Wibowo Pedo, Richardus Korsini Eno Bone, and Adrianus Yuventus Mali. "Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Di Dusun I, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Local Engineering* 2, no. 2 (2024): 71–78.

Destiani, Yolanda Rama. "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)" 17 (1385): 302.

Dinsar, Arfandi. "Pengaruh Mutasi Dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang." *Amsir Management Journal* 1, no. 2 (2021): 46–52.

Diyanti, Diyanti, Fani Yayuk Supomo, Febry Mandasari, Andi Asnur Pranata, Tri Handayani, and Asri Wulan. "Pengelolaan Dan Preservasi Drainase Jalan Berkelanjutan Berbasis Komunitas." *Jurnal JANATA* 2, no. 2 (2022): 44–53.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).

Hakim, D. A., and H. Nopriza. "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara." *Jurnal Hukum POSITUM* 7, no. 2 (2022): 205–27.

Huda, Muhammad MIftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hak Azazi Manusia 11, no. 1 (2022): 115–34.

Kasmiani. "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)," No. February (2024): 4–6.

Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, and Maulida Putri Rahmawati. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan Di Kelurahan Langenharjo)." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 346–61.

Monalisa. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang)," 2023, 1–23.

Nur, Adi Aspian. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Bulungan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 1–12.

Nurul Komalasari, and Anis Sagaf. "Analisis Keterkaitan Hasil Survei Kondisi Jalan Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 2, no. 2 (2024): 115–23..

Putri, Amelia, Slamet Muchsin, Retno Wulan Sekarsari, Jl Mt, and Haryono Malang. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Infrastruktur Jalan Di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Pendahuluan Tinjauan Pustaka" 18, no. 7 (2024): 1–9.

Putri, Mayyadah, Rodiah Nur Efa, and Sukandi Ahmad. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Hukum Sehasen*, 2025.

Rae, Maria Vianey, Maria Goreti Malut, Antonius Y W Timuneno, and S Akun. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 1–18.

Rion, Rion. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019." *Pamarenda Public Administration and Government Journal* 2, no. 3 (2023): 241..

Sadikin, Sadikin, Sjuaib Hannan, and Ulya Sunani. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda." *Journal Peqguruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 834.

Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57.

Siagian, Supriadi. "Manajemen Sumber Daya Manusia." *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*, 2023.

Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, and Yohana Manulang. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302.

Soekanto, Soerjono. "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi." *Bandung: CV. Ramadja Karya* 80 (1988).

———. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

Soliha, Wiwi. "Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 13, no. 3 (2022): 141–45.

Wedagama, Dewa Ayu Trisna Adhiswari, Ida Bagus Gde Agung Yoga Pramana, and I Made Satya Graha. "Implementasi Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Konstruksi Jalan Di Kota Denpasar." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 466–74..

Wibowo, Arief Eko, and Rachmat Mudiyono. "Tantangan Pengembangan Dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Jawa Tengah." *Pondasi* 29, no. 2 (2024): 201–13.

Wulandari, Mustika, Pradita Mawardani, Zaqi Rohman, and Suci Hayati. "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus Di Provinsi Lampung." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 3752–63.

Yuan Isha Mahastu , Drs. Joko Suranto, M.Si , Dra. Damayanti Suhita, M.Si. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten WonogiriNo. 6 Tahun2021 Tentang Pembangunan Infrastruktur Di Keluarahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri." *Sports Culture* 15, no. 1 (2024): 72–86.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran*. Amara Books, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Muhammad Sastera ST.MT
Kepala bidang Bina Marga



Wawancara dengan Ir. Sariopu, ST.MT
Penata Kelolal Jalam dan Jembatan Ahli MUDA



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Arsyad kepala lingkungan PAO



Wawancara dngan Ismail masyarakat



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA



Ardhita Ughiatmi tanggal 28 November 2003, Anak ketiga dari pasanganBapak H. Najemuddin dan Ibu Hj. Yanna. Alamat rumah di Lingkungan Pao Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 78 Pao lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mattiro Bulu lulus pada tahun 2018, kemudian melakukan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 7 Pinrang lulus pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan Pada Tahun 2022 di perguruan tinggi program strara satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada Saat Menempuh Pendidikan Di IAIN Parepare, Penulis Pernah Menjabat Sebagai Wakil Sekertaris Di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Dan Penulis Juga Merupakan Anggoota Dari Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA).

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Dinas PUPR Terkait Perbaikan Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang Di Kecamatan Mattiro Bulu"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE